

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Komunikasi adalah sebuah proses bagi manusia dalam berbagi informasi, ide, dan perasaan (Hybels, 2007: 8). Karenanya komunikasi merupakan aktifitas dasar manusia, dengan komunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat kerja dan di manapun manusia berada (Muhammad, 2000: 1). Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Person (2003: 4) bahwa komunikasi merupakan inti dari kehidupan manusia. Komunikasi yang efektif dapat membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidak dapat dipungkiri, baik secara individu maupun berkelompok, dan tentunya bagi sebuah organisasi. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Nicotera dalam *Building Theories of Organization The Conctitutive Role Of Communication* (2009:1) bahwa komunikasi merupakan inti dari sebuah organisasi. Artinya tanpa komunikasi sebuah organisasi tidak akan bisa berkembang dan mencapai tujuan. Hal ini dikarenakan dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil. Begitu juga sebaliknya kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat mengakibatkan kegagalan organisasi.

Menurut Kohler sebagaimana dikutip Muhammad (2000: 1) menerangkan bahwa komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua organisasi. Oleh karena itu, para pemimpin organisasi dan para komunikator

dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka.

Di dalam organisasi semua kegiatan organisasi diawali dengan adanya lalu lintas komunikasi. Proses penetapan tujuan, memberikan tugas dan laporan, dilakukan menggunakan komunikasi. Komunikasi bertindak dan berfungsi mengendalikan perilaku anggota organisasi dalam berbagai cara. Paling sedikit komunikasi melakukan empat fungsi utama dalam organisasi, yaitu fungsi kendali, informasi, motivasi, dan penyampaian perasaan emosional. Fungsi komunikasi secara internal ini akan berujung pada diri para anggota organisasi itu sendiri, berupa kemunculan kesadaran diri terhadap organisasinya, antara lain pemahaman terhadap kinerja organisasi, struktur organisasi, dan reputasinya.

Dari uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya peranan komunikasi dalam suatu organisasi, yang dikenal dengan istilah komunikasi organisasi. Menurut Goldhaber sebagaimana dikutip oleh Muhammad (2000: 67) menerangkan bahwa komunikasi organisasi memiliki pengertian sebagai berikut: “organizational communication is the process of creating and exchanging messages within a network of interdependent relationship to cope with environmental uncertainty”.

Dengan kata lain komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah.

Adapun komunikasi organisasi yang peneliti maksud, ialah strategi komunikasi sebuah organisasi dalam menyampaikan pesan kepada komunikan, yang mana beragam macamnya. Baik individu maupun kelompok bahkan khalayak ramai atau publik. Hal ini berdasar pada pemahaman peneliti bahwa jantung organisasi ialah mereka para anggota organisasi, yang dalam hal ini peneliti katakan sebagai komunikator (apapun bentuk jabatan mereka secara struktural), walaupun pada saat tertentu mereka bisa pada posisi sebaliknya yaitu komunikan. Tentunya semua itu terlepas dari jabatan struktural komunikator maupun komunikan.

Demikian pula yang diungkapkan oleh Effendi dalam *Dinamika Komunikasi* (1986: 35) bahwa berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi. Oleh karena itu maka melihat lebih jauh mengenai strategi komunikasi sebuah organisasi merupakan sebuah keharusan, mana kala mengingkingkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Di dalam merumuskan strategi organisasi, para anggota organisasi dituntut untuk mampu melakukan beberapa hal. Diantaranya adalah mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, dan seleksi penggunaan media (Fajar, 2009: 183-203). Hal ini menegaskan kembali bahwa keberhasilan komunikasi organisasi ditentukan oleh strategi komunikasi, yang mana ujung tombak dari strategi tersebut ialah seorang komunikator.

Hal ini seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan HTI di dalam mengupayakan berdirinya *khilafah Islamiyah*. Satu diantara hal yang diperhitungkan oleh HTI

untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam adalah pertimbangan dari sisi khalayak (penduduk). Diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.

Hal tersebut menurut Muhammad Usman selaku pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HTI pada saat mengisi acara *Liqo Syawal* dengan tema “Indonesia Milik Allah, Peran Ulama dalam Perjuangan Menegakkan Khilafah”. Menjelaskan bahwa kenyataan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam merupakan suatu pertimbangan khusus mengapa HTI berjuang dengan sekuat tenaga untuk menjadikan Indonesia sebagai negara *khilafah Islamiyah*.

HTI beserta organisasi keagamaan lain muncul pada era pasca reformasi. Walaupun kehadiran mereka sudah ada sejak sebelum reformasi bergulir. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Afdal (2005: 109) bahwa kebangkitan Islam di Indonesia secara umum dipahami sebagai hadirnya gejala-gejala keagamaan yang muncul secara dominan sejak tahun 1980an. Hal ini ditandai oleh menguatnya kecenderungan orang-orang Islam untuk kembali kepada agama mereka dengan mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Era reformasi memberi ruang keterbukaan dan kebebasan tersendiri bagi masyarakat Indonesia membuat gerakan Islam yang cukup radikal. Gerakan ini disebut radikal, karena pengikutnya terkadang melakukan aksi-aksi yang menurut ukuran umum tergolong sangat kasar, misalnya menghancurkan segala hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama mereka (Afdal, 2005: 1).

Gerakan keagamaan tersebut dikenal juga dengan istilah gerakan Islam kontemporer. Adapun gerakannya menurut Afdal (2005: 111) secara umum ditandai oleh beberapa upaya:

1. Menemukan beberapa bentuk pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam yang perlu untuk dirumuskan dan disodorkan sebagai alternatif terhadap sistem yang berlaku sekarang.
2. Menerapkan ajaran Islam secara praktis tidak hanya sebagai konsep-konsep yang abstrak.
3. Meningkatkan keberagaman masyarakat.
4. Melakukan purifikasi keagamaan.

Dari empat hal tersebut menurut Afdal (2005: 12) beberapa organisasi atau kelompok keagamaan yang masuk dalam kategori tersebut adalah, Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Salafi, Front Pemuda Islam Surakarta, Hizbut Tahrir Indonesia dan lain sebagainya.

Upaya-upaya untuk menerapkan syariat dan purifikasi telah dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut di atas. Akan tetapi yang paling gigih menurut hemat peneliti adalah HTI. Walaupun di kategorikan sebagai gerakan radikal, namun HTI melakukannya dengan cara-cara yang santun yaitu secara dialogis. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Afdal (2005:126) bahwa HTI dalam mewujudkan cita-citanya menggunakan cara-cara yang cukup elegan, misalnya melalui kegiatan ceramah umum atau diskusi-diskusi yang melibatkan banyak orang dari berbagai kalangan.

Oleh karena itulah hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang HTI dari sisi strategi komunikasi

organisasinya. Selain itu, dibandingkan dengan organisasi semacamnya, HTI terlihat lebih eksis dan mampu berinteraksi secara baik dengan masyarakat Indonesia.

Hal ini terbukti dengan kuatnya beberapa penolakan terhadap HTI, namun sampai saat ini HTI justru semakin berkembang dengan menjalankan setiap aktifitasnya guna mencapai tujuan yang diinginkan. Satu diantara kegiatan yang cukup mencengangkan ialah Rapat dan Pawai Akbar, yang akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno dan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, 30 Mei 2015. Di Jawa Tengah kegiatan ini sudah berlangsung di alun-alun Simpang Lima Semarang pada 26 April 2015.

Terlebih lagi jika dilihat dari kelahirannya HTI yang muncul pasca era reformasi hingga saat ini sudah berkembang dan muncul di 33 kota besar seluruh Indonesia. Informasi ini peneliti dapatkan dari broadcast salah seorang anggota HTI Banyumas saudara Sulaiman. Ini juga dikuatkan dengan agenda HTI tentang Rapat dan Pawai Akbar yang dilakukan di beberapa kota besar diantaranya; Jayapura, 09 Mei 2015 di Taman IMBI, Batam, 10 Mei 2015 di Lapangan Engku Putri, Baubau, 10 Mei 2015 di Stadion Betombari, Lampung, 10 Mei 2015 di Stadion PKOR Way Halim, Bengkulu, 10 Mei 2015 di Halaman Stadion Semarak Sawah Lebar, Mamuju, 10 Mei 2015 di Lapangan Merdeka, Mataram, 10 Mei 2015 di Lapangan Umum Sengkareng, Medan, 10 Mei 2015 di Stadion Teladan, Bandung, 14 Mei 2015 Lapangan Gasibu, Manado, 04 Mei 2015 di Masjid Raya Ahmad Yani, Semarang, 09 Mei 2015 di alun-alun Simpang Lima dan lain sebagainya.

Hal tersebut menunjukkan betapa pesatnya perkembangan mereka, demikian itu tidak mungkin bisa terjadi jika HTI tidak didukung dengan komunikasi organisasi serta strategi komunikasi yang cermat. Selain itu daya tarik lainnya ialah apa yang diungkapkan Jurdi (2008: 383) bahwa HTI merupakan organisasi yang paling semangat memperjuangkan terwujudnya *khilafah Islamiyah* di Indonesia bahkan di seluruh belahan dunia. Oleh karenanya hal ini semakin memperjelas bahwa HTI sangat terorganisir, tentunya hal tersebut tidak bisa lepas dari peranan strategi komunikasi organisasi.

HTI merupakan organisasi yang gerakannya senantiasa melakukan perjuangan untuk membangkitkan umat di seluruh dunia dalam rangka mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali *khilafah Islamiyah*. HTI dalam skala internasional dipelopori oleh seorang ulama alumni Al-Azhar yaitu Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani. Selain itu beliau pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina (<http://hizbut-tahrir.or.id>, didownload pada 14 April 2014).

Anggota HTI dalam pergerakannya berpegang teguh pada ajaran pendirinya An-Nabhani, sehingga sebagaimana dijelaskan oleh An-Nabhani dalam bukunya *Mafahim Hizbut Tahrir* (2001: 70) bahwa konsep dakwah hendaknya dipahami dari dua sisi, yaitu dakwah sebagai suatu proses mengajak masuk Islam dan dakwah sebagai suatu proses melanjutkan Islam. Hal ini dimaksudkan guna mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh dakwah. Oleh karenanya An-Nabhani menegaskan bahwa dakwah mengajak masuk Islam ditujukan kepada non muslim. Mereka diseru untuk masuk dan

memeluk Islam. Metode praktis kepada mereka dilakukan dengan menegakkan hukum-hukum Islam ditengah-tengah mereka oleh Daulah Islam. Mereka diseru dengan menjelaskan akidah serta hukum-hukum Islam, sampai mereka dapat mengetahui keagungan Islam.

Oleh sebab itulah An-Nabhani (2010: 112) berkeyakinan bahwa dakwah menyeru kepada Islam harus dilakukan oleh *Daulah Islam*. Adapun dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam ditujukan kepada masyarakat yang individu-individunya mayoritas muslim, tetapi tidak menerapkan hukum selain Islam. Menurut An-Nabhani masyarakat yang demikian itu disebut sebagai *Darul Kufur*.

Dakwah ditengah-tengah masyarakat seperti ini dilakukan dalam rangka mendirikan *Daulah Islam* yang akan menerapkan Islam ditengah-tengah masyarakat tersebut, serta mengemban dakwah kepada masyarakat lainnya (non muslim). Langkah ini dilakukan apabila tidak ada *Daulah Islam*. Apabila di dunia ada *Daulah Islam* yang menerapkan Islam secara sempurna, maka dakwah dilakukan untuk menggabungkan berbagai wilayah menyadi wilayah *Daulah Islam*, sehingga terbentuklah *Darul Islam* (An-Nabhani, 2010:113). Demikian itu dijaga dan diperjuangkan secara serius dan terus menerus oleh para anggota HTI.

Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh Jurdi (2008: 384) bahwa sejak awal berdirinya HTI memiliki cita-cita besar yaitu melangsungkan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut HTI berpendirian harus dilakukan melalui pembentukan negara Islam dengan sebutan *khilafah Islamiyah*. Hal ini

juga diperkuat oleh pendapat Qadeem Zalum dalam *How the Khilafah was Destroyed* (2000: 202) bahwa untuk mengembalikan kejayaan Islam adalah melalui metode pendirian *khilafah*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa HTI memiliki tujuan pokok membentuk negara Islam, sebagai langkah utama untuk melakukan gerakan dakwahnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Afdal (2005: 268) bahwa HTI mengklaim kekhilafahan memiliki dimensi-dimensi positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara dengan batas-batas seperti sekarang ini. Hal itu dikarenakan dalam bentuk kekhilafahan, negara-negara lain merupakan bagian dari negaranya. Sementara itu, dalam bentuk negara modern sekarang ini satu negara mendominasi negara lain berdasarkan kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Oleh karena itu menurut hemat peneliti HTI dapat dikatakan sebagai gerakan umat Islam modern yang berusaha untuk mewujudkan kembali *khilafah Islamiyah* sebagaimana terjadi pada awal-awal Islam setelah Nabi Wafat. Oleh karena itu menjadi suatu semangat tersendiri bagi HTI, mana kala banyak kelompok-kelompok umat Islam lain yang menyerukan formalisasi syariat Islam.

Sebagai contoh, yang sedang menjadi perbincangan baru-baru ini ialah *ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria)*. Akan tetapi walaupun memiliki tujuan yang sama *ISIS* dan HTI berbeda cara dalam mewujudkannya. *ISIS* cenderung menggunakan tindakan kekerasan, seperti pengeboman dan pembantaian. Indonesiapun tak luput dari ancaman *ISIS*, sebagaimana diberitakan oleh koran Sindo Kamis 21 Agustus 2014, bahwa *ISIS* mengancam akan meledakan

Candi Borobudur. Hal ini sebagaimana dikutip Koran Sindo dari laman *Facebook* Hartono Ahmad Jaiz “We Are All Islamic State”, di laman tersebut Hartono Ahmad Jaiz menulis “Candi Borobudur bakal dihancurkan oleh ISIS karena Borobudur merupakan situs menyesatkan umat dan banyak manusia yang menyembah patung-patung di candi itu”.

Berbeda dengan HTI yang beranggapan bahwa untuk mewujudkan negara Islam tidaklah serta merta dengan mengambil alih kekuasaan, kemudian semuanya dianggap selesai begitu kekuasaan di tangan. Pasalnya menurut HTI hal yang paling mendasar dalam bernegara adalah penerimaan umat terhadap kumpulan pemahaman, standarisasi dan keyakinan yang akan diterapkan kepada mereka. Jika tidak, maka negara itu adanya seperti tidak ada, keberadaannya tidak bisa mewujudkan tujuan bernegara (Al Islam, edisi 718 tanggal 22 Agustus 2014 M).

HTI sebagai sebuah organisasi ideologi Islam yang memiliki tujuan sebagaimana tersebut di atas, pastinya membutuhkan komunikasi organisasi dalam mewujudkan tujuan, terutama dalam hal mengkoordinasikan setiap tugas satuan kerja anggota dan dalam hal dakwah atau menyampaikan ide kepada khalayak umum. Hal ini dikarenakan dengan strategi komunikasi mereka bisa dengan lebih mudah untuk menentukan langkah dan taktik apa yang harus dilakukan supaya maksud dan tujuannya bisa tercapai dengan tepat. Adapun menurut S. Schiefelbein dalam *Communication and Media Strategi in The Jihadi War of Ideas* (2006: 5) menjelaskan bahwa titik pertama dalam melaksanakan jihad atau dakwah adalah harus menggunakan tindakan komunikasi dan penggunaan media yang tepat.

Hal ini juga dijelaskan Mubarak dalam *Psikologi Dakwah* (2014: 46) bahwa dakwah merupakan kegiatan komunikasi, yaitu seseorang atau sekelompok *da'i* mengkomunikasikan pesan kepada *mad'u*, perorangan maupun kelompok. Komunikasi bisa saja hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi bisa juga sebagai hiburan dan bahkan bisa menjadi pengendali tingkah laku. Sesuai dengan salah satu fungsi komunikasi menurut Parek (1996: 98) adalah pengendalian. Maksudnya ialah sistem informasi manajemen dikenal sebagai suatu mekanisme pengendalian. Dalam hal ini menjamin laksanakan rencana-rencana sesuai dengan maksud yang diinginkan.

Demikian juga dakwah, sekurang-kurangnya ia menyampaikan informasi, dalam keadaan tertentu menghibur atau mengingatkan dan idealnya mendorong *mad'u* pada tindakan atau mempengaruhi tingkah lakunya. Oleh karenanya secara teknis dakwah adalah komunikasi antara *da'i* (komunikator) dan *mad'u* (komunikan), dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan dakwah adalah juga komunikan.

Semua hukum yang berlaku dalam sistem komunikasi berlaku juga pada dakwah, hambatan komunikasi adalah hambatan dakwah pula dan bagaimana cara mengungkapkan apa yang tersembunyi dibalik perilaku manusia dakwah, sama pula apa yang harus dikerjakan terhadap manusia komunikan. Mubarak (2014: 46) menegaskan bahwa cara kerja psikologi dakwah adalah sama dengan cara kerja psikologi komunikasi, karena manusia yang menjadi pelaku dakwah dan pelaku komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang berpikir, berperasaan dan berkeinginan.

Strategi HTI guna mewujudkan *khilafah Islamiyah* dilakukan melalui tiga tahap yaitu: *Pertama*, tahapan *tsakif* (pembinaan dan pengkaderan), yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir, dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai. *Kedua*, tahapan *ta'aful* (berinteraksi), yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. *Ketiga*, tahapan *istilaam al hukmi* (pengambil alihan kekuasaan), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia (Hilmy, :2009: 348). Melihat fakta tersebut dapat peneliti katakan bahwa HTI sangatlah matang dalam merumuskan tahapan strategi komunikasi serta target dari setiap capaiannya.

Menyampaikan suatu ide atau gagasan, nampaknya sederhana, karena tiap hari dilakukan oleh setiap orang dalam berkomunikasi. Namun demikian, pada suatu organisasi sering terjadi hambatan. Hal ini dikarenakan setiap langkah organisasi ditentukan bukan oleh individu melainkan kesepakatan bersama. Akan tetapi HTI sebagai organisasi politik keagamaan tak putus asa untuk melewati hambatan tersebut dan mampu mempengaruhi banyak pemhaman publik tentang gagasan *khilafah Islamiyah* yang didengungkannya, walaupun senyatanya hingga saat ini menurut hemat peneliti HTI masih jauh dari kata berhasil. Hal ini bisa jadi karena belum ada rujukan secara pasti dalam bentuk negara tentang *khilafah Islamiyah*.

Akan tetapi jika dilihat pada wilayah keIndonesiaan HTI cukup masif dan berkembang secara keanggotaan, bahkan mereka mampu hidup dan

bertahan serta terus berkembang di negara yang berlandaskan pada sistem demokrasi dan berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Perkembangan pesat HTI bisa dilihat dari kuantitas anggotanya dan intensitas kegiatan di ruang publik, yaitu dalam bentuk pawai, seminar (baik yang bersekala, internasional, nasional dan lokal), dialog dan diskusi publik, serta proliferasi media di berbagai daerah dan tanah air. Bahkan cabang HTI telah tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia termasuk di Papua. Selain itu di dunia maya dalam hal ini internet dengan berbagai layanannya, HTI sangat aktif menunjukkan keberadaannya serta pro aktif dalam merespon isu-isu nasional dan internasional. Sebagai contoh isu tentang pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak dan dukungan atas Palestina.

Secara akademik yaitu kaitannya dengan dakwah, yang mana dakwah menurut Quraish Shihab sebagaimana dikutip oleh Munir (2006: 20) merupakan seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Oleh karena itu terbentuknya gerakan dakwah yang masif merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok.

Hal tersebut pula yang dilakukan oleh HTI, bahkan menurut Rizal dalam penelitiannya yang berjudul *Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Makasar Sulawesi Selatan* (2011: 22-24) HTI mampu memanfaatkan setiap momentum serta berbagai macam media untuk menyuarakan gagasannya. Misalnya merespon isu-isu global yang terkait dengan kebijakan Amerika terhadap negeri-negeri muslim. Bahkan melakukan aksi demonstrasi serentak

diberbagai kota besar di Indonesia untuk mengutuk agresi militer Israel Gaza. Selain itu aktif mengadakan diskusi publik dengan sebutan “Halaqoh Islam dan Peradaban”. HTI juga melakukan publikasi melalui media mengenai berbagai macam kegiatan yang telah atau akan dilakukan serta untuk meyarakan gagasannya. Media yang digunakan antara lain berupa pamflet, buletin, majalah, tabloid, buku, DVD dan website.

Hal ini dapat dikatakan bahwa HTI telah melakukan trobosan dalam memanfaatkan segala media sebagai kegiatan dakwah, baik media cetak maupun elektronik. Oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti berharap akan dapat menemukan bentuk komunikasi organisasi HTI dan strategi komunikasi HTI di dalam mewujudkan *khilafah Islamiyah*.

Hal tersebut penting untuk ditemukan karena melalui penemuan tersebut peneliti berharap dapat membuat cara yang tepat dan terbaik dalam melakukan kegiatan dakwah Islamiyah di era modern sekarang ini. Selain itu dengan diketahuinya bentuk komunikasi organisasi HTI beserta strategi komunikasinya di dalam mewujudkan *khilafah Islamiyah*. Peneliti dapat membantu pemerintah atau masyarakat Indonesia secara umum yang sepakat dengan ideologi Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan pencegahan terhadap gerakan HTI guna mewujudkan *khilafah Islamiyah* di Indonesia.

Dari persoalan dan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **Komunikasi Organisasi (Studi Analisis Strategi Komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas Sebagai Upaya Mewujudkan *Khilafah Islamiyah*)**.

HTI Banyumas menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti dikarenakan daerah ini secara kultur maupun ideologi organisasi didominasi oleh NU dan Muhammadiyah. Melirik NU tentunya tidak lepas dari sejarah berkembangnya berbagai macam *thariqoh* di daerah Banyumas tepatnya di wilayah Sokaraja. Muhammadiyah, dilihat dari perkembangan dunia pendidikan juga sangat berkembang, bahkan di Banyumas terdapat Universitas Muhammadiyah yang cukup besar dibandingkan daerah lain se Jawa Tengah. Selain itu budaya kejawen di daerah ini masih cukup kental. Bahkan mereka menyatu dalam komunitas yang dikenal dengan Bonokeling. Artinya dalam hal ini terdapat proteksi alamiah guna berkembangnya HTI di Banyumas.

Akan tetapi faktanya tidak demikian, keanggotaan HTI Banyumas terus berkembang, bahkan sudah masuk di ranah kampus dan masyarakat awam. Chapter Universitas Jendral Sudirman (UNSOED) juga sudah terbentuk bahkan sangat aktif dalam melakukan berbagai macam kegiatan transformasi wacana keIslaman. Contohnya acara Dauroh Mahasiswa Islam pada hari Sabtu, 11 Mei 2014. Acara yang bertema “Meniti Jalan Perubahan” tersebut dilaksanakan di Mushola Baitul Ma’tsur Fakultas Ekonomi Bisnis Unsoed Purwokerto. HTI Banyumas juga mengadakan Konferensi Islam dan Peradaban pada Minggu, 1 Juni 2014 di gedung KORPRI yang dihadiri hampir ribuan anggota.

Konferensi demikian itu biasanya dilakukan di kota-kota besar, namun faktanya Banyumas-pun mengadakan konferensi tersebut. Hal ini bisa jadi dikarenakan Banyumas menjadi target tersendiri bagi HTI Pusat di dalam mengembangkan pergerakannya. Sebagaimana prinsip HTI yang mencintai

perdamaian, bisa jadi hal tersebutlah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat secara umum untuk bisa terlibat aktif dalam kegiatan HTI bahkan masuk menjadi anggota.

Selain itu menurut Muhammad Usman selaku salah satu Dewan Pengurus Pusat HTI menilai bahwa HTI Banyumas cukup aktif dan semangat dalam berbagai kegiatan dan menjalankan instruksi dari pusat. Artinya terdapat komunikasi yang efektif antara Dewan Pengurus Pusat HTI dengan HTI Banyumas. Tentunya semua itu didukung oleh kualitas berbagai unsur-unsur komunikasi. Karena tanpa itu semua, tidak mungkin akan terjadi.

Terlepas apapun asumsinya, menurut hemat peneliti HTI Banyumas berhasil mengembangkan diri dengan baik ke berbagai sektor kalangan, baik mahasiswa, akademisi, pedagang, petani dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan pengamatan langsung peneliti pada saat mengikuti kegiatan *liqo syawal* pada hari Minggu, 24 Agustus 2014 bertempat di Convention Hall Purwokerto City Walk.

Adanya komunikasi yang bersifat instruktif dari Dewan Pengurus Pusat kepada HTI Banyumas, sesungguhnya memberi peluang tersendiri bagi peneliti untuk mengetahui perkembangan HTI secara nasional bahkan internasional. Maksudnya ialah, untuk mengetahui komunikasi organisasi HTI secara nasional maupun internasional, sesungguhnya bisa dilakukan hanya dengan melakukan penelitian ditingkat struktur paling bawah yaitu Dewan Pengurus Daerah, dalam hal ini adalah Dewan Pengurus Daerah II HTI Banyumas.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah komunikasi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas??"
2. Bagaimanakah strategi komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas dalam mewujudkan *khilafah Islamiyah*??"

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan komunikasi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas.
2. Mendeskripsikan strategi komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas dalam mewujudkan *khilafah Islamiyah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana dan khazanah keilmuan tentang komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi organisasi dan strategi komunikasi.
  - b. Diharapkan dapat menjadi media pembangunan keilmuan pada wilayah komunikasi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Semarang.

- b. Memberikan kontribusi bagi siapapun yang akan mengkaji Hizbut Tahrir Indonesia.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang komunikasi organisasi dan strategi komunikasi masih sangatlah sedikit khususnya di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Berdasarkan penelusuran sementara peneliti terdapat beberapa karya yang membahas tentang komunikasi organisasi dan atau strategi komunikasi. Beberapa diantaranya (Mahfudlah Fajrie 2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Demak Periode 2006-2011 (Studi Analisis Strategi dan Metode Dakwah)* dimana dalam penelitiannya strategi komunikasi organisasi sebagai sebuah perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Oleh peneliti ditempatkan sebagai sarana menuju keberhasilan dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Demak. Penelitian ini menghasilkan sebuah gambaran tentang beberapa macam praktik dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Demak periode 2006-2011.

(Ginjar Prakoso Utomo 2011) *Strategi Komunikasi Pembangunan Pemkot Surakarta Dalam Penataan Ruang publik (Analisis Deskriptif Kualitatif Pada Pra Dan Pasca Relokasi Pasargading)*, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta pada program pra & pasca relokasi pasar. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah dengan melakukan pendekatan persuasif dalam bentuk pendampingan dan motivasi terhadap para pedagang.

(Abdul Basith 2010) *Negara Sekuler Perspektif Jaringan Islam Liberal Dan Hizbut Tahrir Indonesia*. Penelitian ini menghasilkan deskripsi mengenai negara sekuler dari dua organisasi, yaitu JIL dan HTI. Menurut Abdul Basith kontroversi pemikiran Negara sekuler yang muncul telah menimbulkan polemik besar yang cukup berkepanjangan di kalangan intelektual Muslim dan para penggagas pembangunan Islam. Akibat polemik tersebut muncul dua kelompok dikotomis dengan sederetan tokoh intelektual pendukungnya.

Kelompok pertama, suatu kelompok yang menentang keras sekularisasi yang dianggap identik dengan sekularisme. Kelompok kedua, suatu kelompok yang menolak sekularisme sebagai suatu paham tertutup yang anti agama. Menurut kelompok reformis ini, sekularisasi diartikan sebagai upaya pembebasan masyarakat dari kehidupan magis dan tahayyul dengan melakukan desakralisasi alam. Adapun secara praktek, tidak ada negara yang sekuler dan anti agama. Terminologi "negara sekuler" mungkin sudah tidak populer di tanah air, karena sudah terlalu banyak kesalah pahaman atasnya. Seharusnya yang menjadi perhatian selanjutnya adalah bagaimana istilah sekuler tersebut disikapi dan dipelajari tanpa menyalahi norma-norma kebudayaan bangsa kita, sehingga terwujudlah apa yang menjadi angan dan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara.

(Umi Sumbulah 2013) *Islam dan Ahl Al-Kitab : Kajian Living Sunnah di Kalangan Pimpinan NU, Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Malang*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pandang NU, Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Malang terhadap Ahl Al-Kitab. Hasil dari penelitian ini

adalah adanya perbedaan cara pandang terhadap Ahl Al-Kitab dari masing-masing ormas tersebut di atas. Walaupun mereka tetap mau menjalin relasi sosial dengan Ahl Al-Kitab. NU memandang bahwa apa yang disebut Ahl Al-Kitab ialah komunitas Yahudi dan Nasrani, baik yang masih mengakui keesaan Allah maupun tidak. Adapun Muhammadiyah memahami bahwa yang dimaksud Ahl Al-Kitab ialah Yahudi dan Nasrani tempo dulu dan sekarang. Sedangkan Hizbut Tahrir berpendapat bahwa yang dimaksud Ahl Al-Kitab ialah Yahudi dan Nasrani yang memiliki teologi murni. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan. Muhammadiyah menggunakan pendekatan kontekstual dengan meminjam pendekatan kerangka ilmu modern, sedangkan NU menggunakan ilmu keIslaman murni dan memadukannya dengan ilmu modern atau mencukupkan dengan pemahaman yang ditawarkan oleh ulama salaf, adapun Hizbut Tahrir menggunakan pemahaman tekstual.

(Ainur Rofiq 2013) *Demokrasi Persepektif HTI Versus Religious Mardomsalari*. Penelitian ini mengasikkan sebuah cara pandang HTI terhadap demokrasi yaitu bahwa demokrasi merupakan realitas yang menghasilkan dampak negatif baik dalam sistem politik dan pemerintahan serta dalam berbnagai sendi kehidupan rakyat dan umat Islam. HTI memiliki lima alasan penolakan terhadap demokrasi yaitu demokrasi ciptaan akal manusia, demokrasi muncul dari ideologi sekuler, demokrasi berpijak dari kedaulatan ditangan rakyat, demokrasi berpijak pada hukum mayoritas dan demokrasi mengembangkan ide kebebasan. Penolakan demikian didasari karena pemahaman demokrasi oleh HTI adalah stagnan dan tidak dapat diubah oleh

karena itu HTI akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan konstalasi politik global.

Penelitian tentang Hizbut Tahrir Indonesia di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang belum pernah dilakukan. Hal ini berdasarkan penelusuran peneliti di perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting kiranya untuk dilakukan guna pengembangan wahana akademik maupun secara umum.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana ketika penelitian yang lain melihat HTI dari sisi ideologinya atau pemikirannya maka penelitian ini akan membahas HTI dari sisi komunikasi organisasi dan strategi komunikasi, dimana kedua hal tersebut sangat menentukan berhasil atau tidaknya HTI dalam upayanya mewujudkan *khilafah Islamiyah*.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Komunikasi Organisasi**

#### **a. Pengertian Komunikasi Organisasi**

Komunikasi organisasi adalah pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan (Pace, 2005: 31).

Di dalam komunikasi organisasi, hendaknya memungkinkan terjadinya komunikasi ke bawah (pimpinan ke bawahan), komunikasi ke atas (bawahan ke atasan), komunikasi horizontal (lintas fungsi

dalam organisasi) dan komunikasi diagonal (lintas fungsi dan lintas tingkatan dalam organisasi) (Ivancevich, 2005: 121-122).

b. Fungsi komunikasi dalam organisasi

Fajar (2009: 125) menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi baik yang berorientasi komersial maupun sosial, tindak komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut melibatkan empat fungsi yaitu:

1) Fungsi informatif

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu.

2) Fungsi regulatif

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga ataupun organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. *Pertama*, atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. *Kedua*, berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan.

### 3) Fungsi persuasif

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh seorang bawahan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.

### 4) Fungsi integratif

Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut (Newsletter, Buletin) dan laporan kemajuan organisasi, juga saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antar pribadi selama istirahat kerja, pertandingan olah raga ataupun kegiatan darma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri anggota terhadap organisasi.

## 2. Strategi Komunikasi

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang, tanda atau tingkah laku (Suryanto, 2015: 48). Sementara itu strategi menurut Schemerhorn sebabagaimana dikutip oleh

Rosilawati (2008: 156) merupakan suatu perencanaan kegiatan yang komprehensif yang menentukan petunjuk dan pengarahannya yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran jangka panjang organisasi.

Menurut Sondang dalam bukunya *Teori Motivasi dan Aplikasinya* (1989: 20) Istilah strategi dapat digunakan secara sinonim dengan kebijaksanaan dasar. Perannya yang paling penting adalah:

1. Sebagai langkah pertama yang diambil dalam usaha mewujudkan tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Sebagai dasar untuk penyusunan dan penentuan rencana.
3. Sebagai rambu-rambu utama penunjuk jalan yang seyogyanya ditempuh dalam mengemudikan jalannya roda organisasi

Komunikasi bisa berarti proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka (West, 2008: 5). Adapun strategi komunikasi yang peneliti maksud ialah, sebuah langkah taktis dan praktis bagi organisasi didalam mencapai tujuan melalui sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator organisasi kepada komunikan organisasi.

Guna memudahkan peneliti memahami strategi komunikasi, maka peneliti menggunakan konsep strategi komunikasi Harold D. Laswell sebagaimana dikutip oleh Effendi (1986: 37). Menurutnya strategi komunikasi hendaknya dapat dilihat melalui pertautan komponen-

komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Siapakah komunikatornya?
2. Pesan apa yang dinyatakannya?
3. Media apa yang digunakannya?
4. Siapa komunikannya?
5. Efek apa yang diharapkan?

Dari beberapa pertanyaan diatas, sesungguhnya secara implisit mengandung pertanyaan lain yang perlu dijawab dengan seksama.

Pertanyaan tersebut ialah:

1. Kapan dilaksanakannya?
2. Bagaimana melaksanakannya?
3. Mengapa dilaksanakan demikian?

Tambahan pertanyaan tersebut dalam komunikasi sangat penting karena pendekatan terhadap efek yang diharapkan dari suatu kegiatan komunikasi bisa bermacam-macam, yakni: *information*, *persuasion*, *instruction*.

### 3. Hizbut Tahrir Indonesia

#### a. Pengertian Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir (*Hzb al-Tahrir*) secara etimologis berarti Partai Pembebasan. Hizbut Tahrir didirikan oleh Sheikh Taqiyyudin an-Nabhani pada tahun 1953 di al Quds Palestina. Organisasi diakui oleh pendirinya dan sekaligus para aktivisnya bukan sebagai organisasi sosial keagamaan tetapi sebagai partai politik (Afdal, 2005: 266).

Hal tersebut di atas juga ditegaskan oleh Yusanto sebagaimana dikutip Asnawati dalam *Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Depok Jawa Barat dan Kota Semarang* (2011: 79) adalah kelompok politik berdiri berazaskan pemikiran Islam, bukan kelompok spiritual, bukan lembaga ilmiah atau akademis, bukan pula lembaga sosial.

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem *khilafah* dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan (<http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/> 14 april 2014).

b. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas

Berdasarkan interview dengan Abdurrouf selaku ketua HTI Banyumas di sekretariat jalan Banowati no 20 Jatiwinangun Purwokerto. Ia menjelaskan bahwa HTI masuk ke Banyumas sekitar tahun 2000an, yang dipelopori oleh mereka orang-orang yang kuliah di luar Banyumas dan kemudian mengenal HTI di mana mereka kuliah. Seperti halnya di Jakarta, Bandung, Jogjakarta dan daerah lainnya. Sehingga setelah setelah mereka menyelesaikan kuliah dan kembali ke Banyumas, secara naluri sebagai kader dari HTI mereka terpanggil untuk melanjutkan dakwah di mana mereka tinggal.

Dari proses inilah kemudian mereka para kader berkumpul untuk kemudian membentuk kepengurusan HTI Banyumas, atau dikenal dengan istilah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II HTI Banyumas. Hal ini dimaksudkan guna melancarkan kegiatan dakwah sebagai suatu langkah pokok di dalam mewujudkan *khilafah Islamiyah*.

Oleh karena itu pada tahun 2005 terbentuklah susunan pengurus DPD II HTI Banyumas sebagai berikut:

Ketua : Abdurrouf  
 Sekertaris : Jadi Wiryono  
 Bendahara : Abdurrohman

c. Proyek Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia

Menurut HTI dalam *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)* sebuah karya pendiri Hizbut Tahrir An-Nabhani (2014: 14-15) menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta adalah sistem *khilafah*. Di dalam sistem *khilafah* ini *khalifah* diangkat berdasarkan *kitabullah* dan *sunnah* Rasul-Nya untuk memerintah sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan.

Hal tersebut sebagaimana firman Allah kepada Rasul-Nya

فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“Karena itu, putuskanlah diantara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka

*dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu” (al-Maidah: 48).*

Seruan Allah Swt kepada Rasulalloh Saw untuk memutuskan perkara ditengah-tengah mereka dengan wahyu yang telah Allah turunkan juga merupakan seruan bagi umat beliau. Oleh karena itu hendaknya kaum Muslim mewujudkan seorang hakim (penguasa) setelah Rasulullah Saw untuk memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan. Perintah dalam seruan ini bersifat tegas karena yang menjadi objek seruan adalah wajib. Sebagaimana dalam ketentuan ushul, ini merupakan indikasi yang menunjukkan makna yang tegas. Hakim (penguasa) yang memutuskan perkara di tengah-tengah kaum Muslim setelah wafatnya Rasulullah Saw adalah *khalifah*, sedangkan sistem pemerintahannya adalah *khilafah*. Apalagi menegakkan hukum-hukum *hudud* dan ketentuan seluruh hukum syariah adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan terlaksana tanpa adanya penguasa, sedangkan kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka keberadaan sesuatu itu hukumnya wajib. Artinya, mewujudkan penguasa yang menegakkan hukum syariah hukumnya adalah wajib. Dalam hal ini, penguasa yang dimaksud adalah *khalifah* dan sistem pemerintahannya adalah sistem *khilafah*.

*Khilafah Islamiyah* bagi Hizbut Tahrir merupakan sebuah eksistensi politik praktis yang menerapkan Islam, serta

menyebarkannya ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad (al-Amin, 2012: 18).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian tentang komunikasi organisasi “studi analisis strategi komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai upaya mewujudkan *khilafah Islamiyah*” adalah penelitian kualitatif sebab penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan (Sukmadinata, 2011: 94). Penelitian ini adalah penelitian lapangan, artinya peneliti harus terjun secara langsung ke objek penelitian HTI Banyumas guna mendapatkan validitas informasi atau data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, yang mana peneliti terjun langsung kelapangan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisa, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses-proses tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bersifat suatu paparan pada variabel-variabel yang diteliti (Umar, 2010: 7). Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia (Sukmadinata, 2012: 72).

Metode Penelitian ini adalah studi kasus, menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas obyek tertentu, termasuk lingkungannya. Peneliti dalam hal ini dapat berusaha bersama-sama

dengan pengambil keputusan manajemen atau pimpinan organisasi guna menemukan hubungan faktor-faktor yang dominan dengan permasalahan penelitiannya (Umar, 2002: 41).

Oleh karena itu peneliti harus mempelajari secara intensif mengenai unit-unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, atau lembaga masyarakat. Adapun selanjutnya peneliti berusaha untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai komunikasi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas dalam usahanya untuk mewujudkan *kilafah Islamiyah*.

## 2. Sumber Data

Data dalam sumber penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber dari non manusia (Tanzeh, 2011: 58). Adapun lebih jelasnya sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah para pendiri, dan pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas, diantaranya ialah Abdurrouf dan Sulaiman. Data primer penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Adapun bentuk dari data ini adalah catatan tertulis hasil pengamatan atau wawancara, rekaman video/audio tapes, pengambilan foto dan lain sebagainya yang dilakukan langsung oleh peneliti.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh bukan dari sumber pertama atau sumber yang memiliki data dan ia sendiri memperoleh data tersebut dari pihak atau orang lain, baik dalam bentuk tulisan, salinan, turunan ataupun sumber data yang dimiliki oleh bukan orang pertama. Adapun bentuk data dari data primer dapat berupa buku, jurnal dan makalah atau penelitian terdahulu.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Interview

Interview peneliti lakukan dengan ketua HTI Banyumas saudara Abdurrouf dan anggota HTI Banyumas Sulaiman untuk mengetahui lebih jauh mengenai komunikasi organisasi dan strategi komunikasi HTI Banyumas yang diterapkan sebagai upaya mewujudkan *khilafah Islamiyah*. Beberapa pokok pertanyaan diantaranya adalah mengenai, bagaimana sejarah HTI Banyumas?, bagaimana gambaran proses komunikasi organisasi HTI Banyumas?, bagaimana rumusan strategi komunikasi HTI Banyumas dalam upaya mewujudkan *khilafah Islamiyah*?, bagaimana cara HTI Banyumas dalam mengenali dan menentukan komunikan atau khalayak yang menjadi target?, bagaimana HTI Banyumas dalam menyusun pesan atau menentukan tema dan materi?, bagaimana HTI Banyumas dalam menyampaikan pesan?, siapakah komunikator HTI Banyumas?, pertimbangan apa saja yang menentukan HTI Banyumas dalam menggunakan media komunikasi?.

Dalam melakukan interview peneliti mengalami sedikit kesulitan dikarenakan Abdurrouf selaku ketua HTI Banyumas menjelaskan kepada peneliti bahwa informasi untuk penelitian atau yang bersifat keluar hanya melalui satu pintu yaitu dirinya. Beberapa kali peneliti mencoba melakukan interview dengan anggota HTI Banyumas juga ditolak. Diantaranya ialah Khotam Wahid dan Agus Siswanto, mereka justru meminta peneliti untuk interview dengan ketuanya supaya informasinya tidak bersebrangan. Menurut mereka interview hanya bisa dilakukan terhadap ketua.

Oleh karena itu beberapa data peneliti dapatkan melalui obrolan ringan bukan dalam bentuk interview formal. Seperti halnya setelah peneliti melakukan interview dengan Abdurrouf, peneliti melakukan kroscek informasi hasil interview kepada beberapa anggota HTI lain atau peserta kegiatan HTI. Diantaranya ialah Sulaiman, Heri dan Heru.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian yaitu HTI Banyumas dalam upaya mewujudkan *khilafah Islamiyah*. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pengamatan yang mendalam agar memperoleh informasi tambahan yang tidak hanya bersumber dari manusia secara langsung melainkan dari fenomena-fenomena yang ada. Oleh karena itu peneliti menyempatkan diri untuk mengikuti beberapa kegiatan HTI Banyumas yaitu; Liqo

Syawal, Indonesian Congres Moslem Student, Workshop Bisnis Islami, dan Rapat dan Pawai Akbar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi peneliti gunakan untuk mencari data mengenai karya-karya yang diterbitkan oleh HTI khususnya mengenai strategi HTI dalam upaya mewujudkan *khilafah Islamiyah* serta buku-buku yang memuat wacana *khilafah Islamiyah* dan karya-karya lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku-buku tersebut diantaranya ialah *Mafahim Hizbut Tahrir*, Sistem Pergaulan Dalam Islam, Kepribadian Dalam Islam jilid satu dan dua terjemah dari buku *Asy Syakhriyah al Islamiyah*, Sistem Keuangan Negara *Khilafah*, Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia; Indonesia, *Khilafah* dan Penyatuan Kembali Dunia Islam.

Dokumentasi juga peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai HTI Banyumas melalui media sosial dalam bentuk facebook HTI Banyumas dengan akun BanyumasMilikAllah. Dokumentasi juga peneliti dapatkan melalui ikut serta dalam kegiatan HTI sebagaimana peneliti sebutkan di atas. Dokumentasi itu berupa materi yang disampaikan oleh narasumber kegiatan dan berupa foto-foto kegiatan.

4. Metode Analisis Data

Tahap ini peneliti gunakan setelah masalah penelitian dirumuskan, data-data dapat dikumpulkan dan diklasifikasikan. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah menganalisa dan menginterpretasikan data. Setelah itu disederhanakan dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singaribun, 1989: 263).

Adapun teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengolah data dengan melaporkan apa yang telah diperoleh selama penelitian dengan cermat dan teliti serta memberikan interpretasi terhadap data itu ke dalam suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata yang dapat menggambarkan objek penelitian yang dilaksanakan, dengan maksud untuk membandingkan data yang bersifat teoritis data-data praktis yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini metode analisis deskriptif kualitatif yang peneliti gunakan adalah model Miles dan Huberman. Aktifitas dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Langkah dalam melakukan analisis data yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2006: 276-284).

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2005: 92). Setelah reduksi data selesai maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif atau bisa juga dibantu dengan grafik ataupun matrix. Pada tahap yang terakhir yaitu verifikasi atau penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diolah sebagai pembuktian

atau jawaban untuk permasalahan yang ada dalam penelitian ( Sugiyono, 2005: 95-99).

## H. Sistematika Penulisan

Bab pertama, Pendahuluan, bab ini berisi Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab kedua, Komunikasi Organisasi dan Strategi Komunikasi, bab ini berisi Pengertian Komunikasi Organisasi, Unsur-unsur Komunikasi, Fungsi Komunikasi, Bentuk-Bentuk Komunikasi, Arus Komunikasi dalam Organisasi, Media Komunikasi Organisasi, Strategi Komunikasi, Fungsi Strategi Komunikasi, Faktor Manusia dalam Strategi Komunikasi, Komponen Strategi Komunikasi, Korelasi Antar Komponen dalam Strategi Komunikasi

Bab ketiga, Gambaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Konsepsi Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), bab ini berisi Selayang Pandang Hizbut Tahrir, Akar Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas, Visi-Misi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Struktur Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Konsepsi *Khilafah Islamiyah* Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Bab keempat, Penyajian dan Analisis Data Tentang Komunikasi Organisasi, bab ini berisi: Komunikasi Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Strategi Komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Banyumas sebagai Upaya Mewujudkan *Khilafah Islamiyah*.

Bab kelima, Penutup, bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.